



Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal Terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022

Tiara Gadis Riyanti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: tiara19019@mail.unpad.ac.id

Citra Sukmadilaga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran

Email: citra.sukmadilaga@unpad.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the effect of the effectiveness of receiving motor vehicle testing retributions (PKB) and the effectiveness of receiving terminal retributions on the effectiveness of the Bandung City Transportation Department's revenue for the 2019-2022 period. The population in this research is the Bandung City Transportation Department budget realization report. The sample in this research is the budget realization report for the Bandung City Transportation Department for 48 months during the 2019-2022 period (time series). The method used in this research is a quantitative method with secondary data. The data analysis technique used is the classical assumption test, multiple linear regression analysis and then hypothesis testing using IBM SPSS Statistics 23. The research results show that partially the effectiveness of receiving PKB retributions (X_1) has a negative effect on the income of the Bandung City Transportation Department, while the effectiveness of retributions receiving terminal (X_2) does not have a positive effect on the income of the Bandung City Transportation Department. Simultaneously, the effectiveness of receiving PKB retributions and the effectiveness of receiving terminal retributions have a positive effect on the effectiveness of the Bandung City Transportation Department's revenue.*

Keywords: *Effectiveness of PKB Retribution Receiving, Effectiveness of Terminal Retribution Receiving, Regional Original Income*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas penerimaan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan efektivitas penerimaan retribusi terminal terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sampel penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung sebanyak 48 bulan selama periode 2019-2022 (*time series*). Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda kemudian pengujian hipotesis dengan menggunakan IBM SPSS Statistics 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas penerimaan retribusi PKB (X_1) berpengaruh negatif terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung, sedangkan efektivitas penerimaan retribusi terminal (X_2) tidak berpengaruh positif terhadap pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Secara simultan, efektivitas penerimaan retribusi PKB dan efektivitas penerimaan retribusi terminal berpengaruh positif terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Kata Kunci: Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB, Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal, Pendapatan Asli Daerah

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 menjelaskan bahwa pemerintah daerah yang merupakan pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, yaitu daerah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingannya sendiri. Kota Bandung yang menduduki posisi ke dua dengan jumlah PAD terbesar se-Jawa Barat memiliki jumlah kendaraan yang nyaris sama dengan jumlah penduduknya yaitu mencapai 2,2 juta unit kendaraan sedangkan jumlah penduduknya yaitu sebanyak 2,4 juta jiwa, yang bahkan mendapat gelar kota termacet mengalahkan Jakarta (Dilansir dari website Koridor.co.id), merupakan salah satu daerah yang melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Iswanti (2021), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pokok keuangan daerah yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah. Yuliadi, Imamudin (2023) menyatakan bahwa sekitar 50% dari total pendapatan daerah bersumber dari PAD sedangkan yang tersisa bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan legal lainnya. Menurut Peraturan Perundang-Undangan, jika dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Yani, Ahmad (2004) mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber di wilayah setempat, yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan peraturan daerah.

Seiring semakin berkembangnya perekonomian dan pertumbuhan penduduk, tentunya sarana transportasi yang memadai cukup sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna membantu kelancaran aktivitas sehari-harinya. Khususnya angkutan umum, yang mana angkutan umum merupakan alat transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak dan bagi sebagian orang angkutan umum menjadi alat transportasi utamanya. Oleh sebab itu, kenyamanan dan keamanan dari angkutan umum tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting. Untuk menunjang kenyamanan dan keamanan angkutan umum tersebut, diperlukan pengawasan terhadap kondisi angkutan umum itu sendiri. Salah satunya yaitu dengan adanya syarat izin beroperasi seperti adanya izin trayek serta adanya bukti lulus uji kir yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Dalam rangka meningkatkan PAD, secara langsung maupun tidak langsung Dinas Perhubungan Kota Bandung turut berkontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Bandung. Diantaranya yaitu dengan mengenakan retribusi terhadap berbagai layanan di bidang transportasi seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan terminal, yang juga

menunjang kenyamanan dan keamanan alat transportasi. Selain itu, juga memperoleh dari pelayanan di bidang transportasi lainnya yang meliputi parkir, Trans Metro Bandung (TMB), bus sekolah, *Bandung Tour on The Bus* (BANDROS), *Bike On Street Everybody Happy* (BOSEH) serta denda yang diperoleh dari pelanggaran dalam lalu lintas maupun denda atas ketidaksesuaian saat dilakukan pengujian.

Berdasarkan data yang diperoleh, PAD Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022 mengalami fluktuasi. Sumber pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung berasal dari Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Retribusi daerah tersebut terdiri dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) dan Retribusi Terminal. Sedangkan Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB), Denda Derek atas pelanggaran Peraturan Daerah, BLUD Angkutan, BLUD Parkir, dan sebagainya.

Berikut merupakan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022:

Tabel 1. Penerimaan PAD 2019-2022

Tahun	PAD		
	Target	Realisasi	%
2019	Rp 92.107.005.412,00	Rp 22.912.049.432,00	24,88%
2020	Rp 83.774.688.782,00	Rp 15.034.829.286,92	17,95%
2021	Rp 39.377.834.720,00	Rp 13.572.916.847,38	34,47%
2022	Rp 39.400.948.159,00	Rp 21.181.902.036,00	53,76%

Berdasarkan data PAD tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan PAD belum mencapai target anggaran yang ada. Terlihat pula bahwa PAD mengalami pergerakan yang cukup berfluktuasi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya seperti kemunculan wabah COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 serta terjadinya bencana alam seperti banjir.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022. Untuk mengetahui pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022.

KAJIAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yani, Ahmad (2004) mendefinisikan PAD sebagai penerimaan yang bersumber dari wilayah terkait, yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan peraturan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, PAD ialah penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 77 Tahun 2020, PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan salah satu dinas yang bertugas untuk menghasilkan PAD, baik pendapatan retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah. Retribusi yang bersumber dari Bidang Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 3 tahun 2020, yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek, dan retribusi pemakaian kekayaan daerah di bidang perhubungan. Untuk Dinas Perhubungan Kota Bandung, pendapatan retribusinya bersumber dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dan retribusi terminal. Sedangkan untuk pendapatan lain-lain PAD yang sah, PAD tersebut bersumber dari pendapatan dari BLUD Angkutan dan BLUD Parkir, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Wali Kota Bandung nomor 65 tahun 2021. Dimana untuk BLUD Angkutan mencakup fasilitas pelayanan angkutan berupa Bus Trans Metro Bandung, Bandung tour on Bus, BOSEH bike sharing, bus sekolah, shelter/halte, jembatan penyebrangan orang, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk BLUD Parkir, mencakup fasilitas pelayanan parkir berupa tempat parkir milik Pemerintah Daerah Kota, terminal parkir elektronik dan lain sebagainya.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran yang dilakukan atas layanan atau izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu maupun entitas (Yani, Ahmad (2004:55)). Yani, Ahmad (2004:56-62) menjelaskan bahwa retribusi daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemda, yang memiliki tujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh individu maupun entitas. Salah satu jenis retribusi ini yaitu retribusi pengujian kendaraan bermotor. Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan layanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan pemda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas jasa yang diberikan oleh pemda, dengan prinsip komersial karena retribusi ini juga dapat diberikan oleh sektor swasta. Salah satu jenis retribusi jasa usaha yaitu retribusi terminal. Retribusi Terminal ialah pungutan yang dikenakan untuk penggunaan tempat penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di sekitar terminal, yang disediakan oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu.

Retribusi perizinan tertentu ialah pungutan atas pemberian izin kepada individu atau entitas dengan maksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum serta memelihara kelestarian lingkungan.

Pada Dinas Perhubungan Kota Bandung, retribusi terdiri dari dua bagian yaitu Retribusi PKB dan Retribusi Terminal. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2020, dijabarkan bahwa Retribusi PKB dipungut sebagai pembayaran yang dilakukan atas jasa PKB, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Retribusi Terminal, dipungut sebagai pembayaran yang dilakukan atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota.

Efektivitas

Mardiasmo (2018:241) berpendapat bahwa efektivitas ialah memberikan layanan yang tepat sehingga pihak yang berwenang memungkinkan untuk mengimplementasikan kebijakan dan mencapai tujuannya. Beliau juga berpendapat bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuannya. Jika tujuan instansi tersebut tercapai, dapat disimpulkan bahwa instansi tersebut telah berjalan dengan efektif.

Efektivitas retribusi daerah ialah suatu perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan retribusi daerah, hal tersebut dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan dalam pelaksanaan pungutan (Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu dan Rohman, Abdul (2014).

Sehingga dapat disimpulkan juga bahwa efektivitas retribusi daerah merupakan suatu indikator yang mengukur keberhasilan atas pelaksanaan pungutan dan apabila target penerimaan retribusi daerah tercapai, maka daerah tersebut dapat dikatakan efektif.

Berikut merupakan rumus menghitung tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2016) yang kemudian diimplementasikan untuk mengukur efektivitas retribusi daerah:

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Target Retribusi Daerah}} \times 100$$

Berikut merupakan kriteria efektivitas:

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup efektif
75% - 89%	Kurang efektif
<75%	Tidak efektif

Sumber : (Mahmudi, 2016)

Gambar 1. Klasifikasi Persentase Pencapaian Efektivitas

Adapun hipotesis penelitian ini yaitu:

- H₁ : Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022
- H₂ : Efektivitas Penerimaan Retribusi terminal berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022
- H₃ : Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal secara simultan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini yaitu efektivitas penerimaan retribusi PKB, efektivitas penerimaan retribusi terminal, serta efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022.

Tabel 2. Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Independen		
Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) – X_1	Diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan target retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Rasio
Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal – X_2	Diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi retribusi terminal dengan target retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Rasio
Variabel Dependen		
Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung – Y	Diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan target Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung.	Rasio

Sekaran, Uma (2016) berpendapat bahwa populasi merupakan sekelompok orang, peristiwa atau hal-hal menarik yang membuat peneliti tertarik untuk membuat kesimpulannya. Populasi penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung. Sedangkan untuk sampel, yang digunakan yaitu sebanyak 48 bulan (sampel) yang diambil setiap bulan selama periode 2019-2022 (*time series*) dan berasal dari target dan realisasi penerimaan Retribusi PKB, target dan realisasi penerimaan Retribusi Terminal, serta target dan realisasi Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan yang telah audited dan dengan rincian data perbulan yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022. Proses penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Silaen (2018:18) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif yaitu proses penelitian yang menghasilkan data berbentuk angka serta pada umumnya diolah menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Data dalam penelitian ini diolah menggunakan SPSS 23 dan data yang akan digunakan adalah data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ialah uji asumsi klasik, Analisis Regresi Linear Berganda (*Multiple Regression Analysis*) dan pengujian hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,15059521
Most Extreme Differences	Absolute	,111
	Positive	,111
	Negative	-,075
Test Statistic		,111
Asymp. Sig. (2-tailed)		,182 ^c

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 3, dapat terlihat bahwa nilai tingkat signifikansinya sebesar 0,182 yang mana nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 ($0,182 > 0,05$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal.

Multikolinearitas

Tabel 4. Multikolinearitas

Coefficients

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB	,711	1,407
Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal	,711	1,407

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 4. dapat diketahui bahwa nilai VIF variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB (X_1) dan variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal (X_2) adalah 1,407 < 10 dan nilai Tolerance-nya sebesar $0,711 > 0,1$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terjadi multikolinieritas.

Heteroskedastisitas

Tabel 5. Heteroskedastisitas

Coefficients	
Model	Sig.
1 (Constant)	,011
Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB	,590
Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal	,439

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 5, bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Dimana untuk variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB senilai 0,590 dan untuk variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal senilai 0,439. Oleh sebab itulah, dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas.

Autokorelasi

Tabel 6. Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,03408
Cases < Test Value	24
Cases >= Test Value	24
Total Cases	48
Number of Runs	22
Z	-,729
Asymp. Sig. (2-tailed)	,466

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 6. diketahui nilai Asymp. Sig sebesar 0,466, yang mana nilai tersebut lebih dari 0,05 ($0,466 > 0,05$). Dengan demikian, dapat dikatakan tidak terdapat gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,663	,099		6,705	,000
	Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB	-,532	,155	-,539	-3,436	,001
	Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal	,069	,054	,200	1,278	,208

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan tabel 7, bahwa bentuk persamaan regresi linear antara efektivitas penerimaan retribusi PKB dan efektivitas penerimaan retribusi terminal terhadap efektivitas pendapatan dinas perhubungan kota bandung yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \\
 &= 0,663 - 0,532 * PKB + 0,069 * Terminal
 \end{aligned}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,663

Hal tersebut menunjukkan bahwa jika nilai variabel independen yaitu efektivitas penerimaan retribusi PKB (X_1) dan efektivitas penerimaan retribusi terminal (X_2) bernilai 0, maka nilai variabel efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung (Y) adalah sebesar 0,663.

2. Koefisien regresi efektivitas penerimaan retribusi PKB (X_1) sebesar -0,532

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah yang negatif sebesar 0,532 yang memiliki arti apabila efektivitas penerimaan retribusi PKB (X_1) mengalami peningkatan sebesar 1, maka akan menyebabkan penurunan nilai efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung (Y) sebesar 0,532 dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Koefisien regresi efektivitas penerimaan retribusi terminal (X_2) sebesar 0,069

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah yang positif sebesar 0,069 yang berarti apabila efektivitas penerimaan retribusi terminal (X_2) mengalami peningkatan sebesar 1, maka akan menyebabkan peningkatan nilai efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung (Y) sebesar 0,069 dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien Determinasi (R^2)**Tabel 8. Koefisien Determinasi (R^2)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,463 ^a	,214	,179	,1539054

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

Berdasarkan hasil output yang ditunjukkan dalam tabel 8, dapat terlihat bahwa nilai R^2 yaitu sebesar 0,214. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengaruh yang diberikan dari variabel independen hanya sebesar 0,214 atau 21,4% sedangkan sisanya 78,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar penelitian.

Uji T

- **Hipotesis 1**

Berdasarkan hasil output yang ditunjukkan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB yaitu sebesar -3,436 dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan bahwa jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh, t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,436 > 1,67943$. Selain itu juga diketahui bahwa, koefisien regresi efektivitas penerimaan retribusi PKB (X_1) yaitu sebesar -0,532. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022 namun arahnya negatif.

- **Hipotesis 2**

Berdasarkan hasil output yang ditunjukkan dalam tabel 4.5, diperoleh nilai t_{hitung} dari variabel Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB yaitu sebesar 1,278 dengan nilai signifikansi $0,208 > 0,05$. Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan bahwa jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh, t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,278 < 1,67943$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penerimaan Retribusi terminal tidak berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022.

Uji F

Tabel 9. Uji F

ANOVA		
Model	F	Sig.
1 Regression	6,132	,004
Residual		
Total		

Sumber: Data diolah dengan SPSS 23

- **Hipotesis 3**

Berdasarkan hasil output yang ditunjukkan dalam tabel 4.7, dapat terlihat bahwa nilai F_{hitung} yaitu sebesar 6,132 dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan bahwa jika dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yang diperoleh, F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $6,132 > 3,20$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal secara simultan berpengaruh positif terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022.

Pembahasan

Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berdasarkan uji analisis parsial yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas penerimaan retribusi PKB terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebesar -3,436 dengan dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Dimana dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan bahwa jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh, t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,436 > 1,67943$. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial efektivitas penerimaan retribusi PKB berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022. Namun, hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa koefisien regresi efektivitas penerimaan retribusi PKB (X_1) yaitu sebesar -0,532. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien regresi memiliki arah yang negatif sebesar 0,532, tidak sesuai dengan arah hipotesisnya.

Berdasarkan hasil wawancara, pengaruh negatif ini dapat disebabkan karena berkurangnya wajib retribusi PKB dengan alasan kendaraan mereka sudah tidak layak digunakan/tidak lolos uji, kendaraannya dijual atau ditarik lagi oleh leasing karena tidak sanggup membayar cicilan, ataupun ada pemilik kendaraan yang sudah tidak melanjutkan

usahanya, mengakibatkan jumlah kendaraan umum menurun. Ketika kendaraan umum tersebut berkurang, mengakibatkan para penumpang tersebut beralih menggunakan TMB. TMB yang merupakan lain-lain PAD yang sah ini akhirnya meningkat dan hal ini memberikan kontribusi terhadap kenaikan PAD yang berasal dari pendapatan lainnya yaitu BLUD Angkutan. Berdasarkan data, TMB ini merupakan penyumbang terbesar untuk PAD di Dinas Perhubungan Kota Bandung atau dengan kata lain pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan pengalaman bahwa ternyata pajak dan retribusi tidak selalu menjadi yang utama, untuk sekelas Pemkot/Pemprov masih dapat akan selalu begitu. Namun ternyata pada SKPD pola tersebut dapat tidak berlaku, contohnya pada Dinas Perhubungan Kota Bandung ini dan hal tersebut juga dapat mempengaruhi postur APBD.

Selain itu, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan ketidakefektifan penerimaan retribusi PKB. Diantaranya yaitu adanya pandemi covid-19, masih banyaknya wajib retribusi yang tidak patuh untuk melakukan uji kir, kendaraannya dijual namun tidak dilaporkan, melakukan uji kir di luar Kota Bandung, dan yang lainnya sehingga menyebabkan realisasi retribusi PKB tidak mencapai target atau tidak efektif. Salah satu upaya yang dilakukan Dishub Kota Bandung untuk meminimalisir hal tersebut yaitu bekerjasama dengan bidang pengendalian operasional (dalops) untuk melakukan razia kir serta adanya pengiriman surat pemberitahuan atau panggilan untuk melakukan kir. Retribusi PKB ini merupakan salah satu retribusi yang lebih cukup sering mengalami kendala. Oleh sebab itulah, diperlukan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat lagi agar wajib retribusi lebih taat lagi untuk melakukan uji kir sehingga tidak ada kendaraan yang beroperasi di jalan tanpa kir serta penerimaan retribusi PKB dapat lebih efektif dan juga keamanan dan kenyamanan masyarakat di jalan pun tetap terjaga.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020), dimana penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Palopo pada tahun 2010-2019 dengan arah negatif.

Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berdasarkan uji analisis parsial yang dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas penerimaan retribusi terminal terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebesar 1,278 dengan nilai signifikansi $0,208 > 0,05$. Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan bahwa jika dibandingkan dengan nilai t_{tabel} yang diperoleh, t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,278 < 1,67943$. Dari hal tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa secara parsial efektivitas penerimaan retribusi terminal tidak berpengaruh positif terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung Periode 2019-2022.

Berdasarkan hasil wawancara, pada retribusi terminal ini terdapat beberapa faktor kendala yang menghambat realisasi sehingga menyebabkan tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Salah satunya yaitu covid-19. Dimana adanya covid-19 yang masuk ke Indonesia pada tahun 2020 bulan Maret, yang kemudian diterapkan sistem lockdown. Sehingga terminal pun sempat ditutup dan menyebabkan realisasi penerimaan mengalami penurunan yang cukup signifikan termasuk juga efektivitasnya. Selain itu, juga menyebabkan banyaknya angkutan umum yang tidak beroperasi dan kesulitan untuk membayar angsuran sehingga kendaraan tersebut ditarik kembali oleh leasing ataupun pemilik tersebut sudah tidak lagi melanjutkan usahanya, yang mana hal ini menyebabkan menurunnya jumlah angkutan umum yang beroperasi serta menyebabkan menurunnya penerimaan retribusi terminal dan hingga tahun 2022 belum kembali meningkat seperti saat sebelum covid-19. Dengan demikian, sebaiknya dilakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar retribusi terminal guna mendukung pemeliharaan dan peningkatan layanan terminal serta pengawasan yang lebih ketat dan juga memberikan sanksi yang tegas terhadap wajib retribusi yang tidak membayar retribusi terminal.

Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2020); Diana Maryana dan Dinda Yuliana Nurmala (2022); Dessy Wulandari dan Nurlaila (2022); I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020); dan Daniel Nababan dan Ivan Gumilar Sambas Putra (2019), yang mana hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Widhi Sunardika (2018); dan Iswanti (2021), dimana penelitian-penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi PKB dan Efektivitas Penerimaan Retribusi Terminal terhadap Efektivitas Pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung

Berdasarkan uji analisis yang dilakukan secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efektivitas penerimaan retribusi PKB dan efektivitas penerimaan retribusi terminal terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah sebesar 6,132 dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Dimana dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan bahwa jika dibandingkan dengan nilai F_{tabel} yang diperoleh, F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $6,132 > 3,20$. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan retribusi PKB dan efektivitas penerimaan retribusi terminal secara simultan

berpengaruh positif terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung periode 2019-2022.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat kendala yang menyebabkan terhambatnya realisasi penerimaan sehingga penerimaan yang ada tidak efektif. Salah satunya yaitu karena adanya pandemi covid-19, yang mana kondisi tersebut menimbulkan kendala lainnya yang mengakibatkan terhambatnya realisasi penerimaan. Seperti jika level covid-19 sedang tinggi maka aturan yang ada menjadi lebih ketat, seperti banyaknya jalan yang ditutup, termasuk terminal dan parkir, angkutan umum hanya boleh mengangkut 50% penumpang, dan masih banyak lagi. Keterbatasan-keterbatasan itulah yang menyebabkan realisasi tidak dapat 100% tercapai dan rata-rata pendapatan tidak efektif.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dessy Wulandari dan Nurlaila (2022); I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (2020); Daniel Nababan dan Ivan Gumilar Sambas Putra (2019); dan Pratiwi (2020), yang mana hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerimaan retribusi PKB secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
2. Efektivitas penerimaan retribusi terminal secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung.
3. Efektivitas penerimaan retribusi PKB dan efektivitas retribusi terminal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pendapatan Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel X dengan variabel lainnya. Contohnya seperti menambahkan efektivitas penerimaan retribusi izin trayek ataupun juga menambahkan efektivitas penerimaan dari lain-lain PAD yang sah seperti efektivitas pendapatan BLUD Parkir dan efektivitas pendapatan BLUD Angkutan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menghitung keefektivannya dengan cara lain ataupun melakukan penelitian ini pada SKPD atau instansi lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Citra Sukmadilaga, Ph.D., Ak., CA., CACP selaku dosen pembimbing yang senantiasa selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

DAFTAR REFERENSI

- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015). *AKURAT Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 10-35.
- Iswanti, I. (2021). *The Effect of Regional Tax Revenue and Regional Retribution on Increasing Regional Original Income (A Case Study at the Seruyan District Financial and Asset Management Revenue Service)*. *Die*, 12(1), 29-39.
- Kota Bandung. (2020). Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 3. Pemerintah Kota Bandung: Bandung.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya Uji Asumsi Klasik Pada Analisis Regresi Linier Berganda (Studi Kasus Penyusunan Persamaan Allometrik Kenari Muda [*Canarium Indicum* l.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 14(3), 333-342.
- Maryana, D., & Nurmala, D. Y. N. Y. (2022). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Periode 2019-2021. *Jurnal Akuntansi*, 16(02), 22-31.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Nababan, D., & Putra, I. G. S. (2019). *The Effect of Regional Tax and Regional Returns on Increasing Regional Income of West Java Province*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(12), 42-54. Retrieved from www.scopus.com
- Pemerintah Kota Bandung. (2021). Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 69 Tahun 2020. Kota Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Pratiwi. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Muhammadiyah Palopo.

- Puspitasari, E. R. A., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-15.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach. United Kingdom : John Wiley & Sons.*
- Silaen, S. (2018). Metode Penelitian Sosial untuk Penulisan Laporan tugas akhir dan Tesis. Bogor: Penerbit In Media
- Sjafari, I. (2023, February 12). Bandung Bakal Pertahankan Gelar Kota Termacet Kalahkan Jakarta, Meski Jumlah Kendaraan Di DKI Hampir 10 Kali Lipat. *Retrieved from* <https://koridor.co.id/humaniora/tampaknya-bandung-bakal-mempertahankan-gelarnya-sebagai-kota-termacet-di-indonesia-mengalahkan-jakarta-dan-surabaya-meski-jumlah-kendaraan-di-dki-hampir-10-kali-lipat-dibanding-bandung/>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338.
- Wulandari, D., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 1392-1397.
- Yani, A. (2004). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yuliadi, I. (2023). *Determinants of local government revenue: A survey of regional economic development in Indonesia. Quality - Access to Success*, 24(193), 204-211. doi:10.47750/QAS/24.193.23